

BAB II

NAHLATUL ULAMA DALAM PARTAI POLITIK

A. Kronologi Lahirnya NU

Rahdlatul Ulama (NU) secara resmi berdiri di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. NU didirikan oleh KH Hasvim Asy'ari bersama beberapa ulama-ulama tradisional seperti KH Wahab Hasbullah serta beberapa ulama pesantren lainnya. Namun berdirinya Jam'iyyah ini sesungguhnya bantulah pelembagaan tradisi keagamaan yang telah lama mengakar.¹

Jauh sebelum lahir sebagai organisasi, NU telah ada dalam bentuk komunitas (*jamaah*) yang diikuti oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakter *Ahlus Sunnah wal Jamaah*. Wujudnya sebagai organisasi tak lain adalah "penegasan formal dari mekanisme informal para ulama sebaham".² Maksud dari pendirian organisasi ini tidak lepas dari konteks, dalam upaya meniaga

¹Kecina Marijan, *Goo Vadis Nu Setelah Kembali ke Kristan* 1926 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1922) 3.

²Chotruji Pinem, Profil Nahdlatul Ulama Sebagai Organisasi Besar Keagamaan Berislamah Ahlussunnah wal Jamaah, Tesis Fakultas Ushuluddin Surabaya IAIN Sunan Ampel, 1999 h. 212.

eksistensi jamaah tradisional berhadapan dengan arus
paham pembaharuan Islam.

Masuknya paham pembaharuan Islam ke Indonesia oleh semakin banyaknya umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, sejak dibukanya Terusan Suez (1869). Bersamaan dengan itu, di Timur Tengah sedang merebak aiaran pembaharuan dan purifikasi aiaran Islam, seperti gerakan pembaharuan Muhammad Abdul Wahab yang kemudian dikenal sebagai Wahabiyah, maupun pemikiran Pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani yang dilanjutkan Muhammad Abdur.³ Tak ayal, kontak pemikiran intensif antara para jemaah haji Indonesia dengan paham pembaharuan ini berlangsung. Ketika kembali ke tanah air, para haji membawa pemikiran itu untuk memurnikan aiaran Islam dari unsur-unsur yang dianggap berasal dari tradisi di luar Islam.

Tak semua kalangan menerima saham pembaharuan itu secara bulat. Sekelompok ulama pesantren (*nota bene* juga halii) menilai bahwa penekanan ajaran Islam secara murni tidak selalu berimbalikasi perombakan total terhadap tradisi lokal. Tradisi ini bisa saja diselaraskan dengan ajaran Islam secara lewes. Kalangan yang dikenal sebagai ulama tradisional, mengamati upaya purifikasi ajaran

³ Bellar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1960-1942* (Jakarta: LP3ES, 1971) cet. vi 39.

Islam dengan cemas. Sebab tidak mustahil jika hal itu di lakukan secara frontal dan radikal akan mengguncang masyarakat. Terlebih lagi, upaya tersebut berindikasi pendobrakan tradisi keilmuan yang selama ini dianut oleh para ulama pesantren.⁴ Perkembangan inilah yang dilihat sebagai ancaman terhadap kelestarian paham Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka anut. Karena itu, mereka berupaya membuat pengimbang bagi arus gerakan pembaharu yang berkembang di Timur Tengah, dalam konteks ini antara lain NU terbentuk.⁵

Arti penting lain pembentukan NU adalah berkait dengan semangat nasionalisme ditengah iklim kolonialisme, serta membela eksistensi umat Islam dari penindasan kolonial. Sulit dibantah bahwa perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda tidak hanya membawa wacana politik juga keagamaan.

⁴ Ulama pesantren memegang madzhab empat dalam ibadah fiqh, mengikuti al-Ghazali dan Juned al-Baghdadi dalam bertasawuf. Kekhawatiran ini berlangsung ketika ada gerakan pembaharu yang lebih menekankan pada gerakan-gerakan purifikasi, kembali ke al-Qur'an dan As-sunnah—mulai masuk ke jazirah Arab. Lihat Martin van Bruinessen, *Muslim Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Necana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994) h. 32-34.

⁵Melalui KH Bisri Syamsuri sebagai generasi muda NU yang mempunyai integritas keilmuan tinggi membentuk kelompok kajian (*tansfikur al-afkar*) bersama generasi lainnya mengakaji berbagai perkembangan aktual. Dari kelompok kajian ini, NU membentuk delegasi sendiri pada Kongres Dunia Islam--yang hanya diwakili oleh kalangan Islam pembaharu Indonesia. Utusan delegasi ini semula bernama kelompok Hijaz, tetapi kemudian mengubah nama menjadi Nahdlatul Ulama. Lihat Anam, *op.cit.*, h. 45-60.

politik kebangsaan yang melahirkan sikap nasionalisme, tapi juga melahirkan wacana keagamaan. Dalam wacana keadamaan itulah peran kepemimpinan ulama menjadi penting (sebut saja Perang Diponegoro 1825-1830, Perang Paderi 1821-1837, perlawanan rakyat Aceh 1872-1912). Ketika pada abad XX ada perlawanan terhadap penjajah berweser dari perjuangan bersenjata menjadi pergerakan nasional, para ulama tidak mau ketinggalan. Sepuluh tahun sebelum berdirinya NU, KH Wahab Hasbullah mendirikan *Nahdlatul Wathan* (kebangkitan tanah air) yang berusaha menumbuhkan rasa nasionalisme melalui pendidikan. Organisasi ini merupakan langkah konkret dari diskusi *Taswirul Afkar* (konsensi pemikiran) yang sebenarnya merupakan antisipasi Wahab Hasbullah menghadapi eksos gerakan pembaharuan yang menjadi ancaman bagi eksistensi tradisi *Ahlussunnah wal Jamaah*. Dalam perkembangannya, Nahdlatul Wathanlah sebenarnya cikal bakal lahirnya NU.⁵

Proses kronologis kelahiran NU perlu memperoleh perhatian, sebab karakteristik organisasi ini lebih berakar di sini. Satu hal perlu dicatat dari proses kelahiran yang pada hakikatnya merupakan reaksi terhadap arus pembaharuan Islam dan situasi kolonialisme tersebut, yakni bahwa pola perilaku reaktif semacam itu ternyata

Lithium bromide SO_2 salt $\geq 4-35\%$

menjadi inheren dalam dinamika NU selanjutnya. Refleksi pola perilaku reaktif NU antara lain adalah keluarnya organisasi ini dari Masyumi, disusul dalam PPP dan terakhir berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui organisasi NU.

Apa yang dapat disimpulkan dari tulisan di atas adalah bahwa betapapun NU terutama sekali lahir dan berdiri sebagai organisasi sosial keagamaan (*jam'iyyah diniyah*), namun kibaran panji-panji keagamaan yang ada telah dipikul dengan semangat politis yang cukup telas. Visi politis jamaah yang terwadahi dalam NU, dengan sub-sub wadah berupa pesantren-pesantren, tercermin misalnya dalam sikap ekskapsisme mereka berhadapan dengan kolonialisme.

Sejak awal, NU mempunyai potensi politik yang tidak bisa dianggap kecil. Disamping sebab yang mendasar bahwa dalam karakteristiknya yang universal, meliputi segala aspek kehidupan manusia, Islam tidak dapat dipisahkan dari politik, dan sebaliknya, politik tidak bisa dipisahkan dengan Islam.

B. NU Dalam Perjalanan Menuju Partai Politik

Selama beberapa waktu, orientasi politik dalam diri RU masih bersifat idea, dalam pengertian RU tidak terlibat dalam gerakan politik praktis. Lahan politik

menjadi garapan kalangan nasionalis dan kalangan Islam moderenis yang berada di SI.

Orientasi politik NU baru muncul secara lebih terbuka setelah tampilnya beberapa tokoh muda seperti Wahid Hasyim dan Ma'hadz Siddiq dalam kepemimpinan NU di pertengahan dekade tiga puluhan.⁶ Langkah konkret dari lahirnya orientasi politik itu adalah bergabungnya NU ke dalam *Majlis al-Islam A la Indonesia* (MIAI) pada 1939.

MIAI dibentuk pada 1937 atas dasar keinginan untuk memperkuat tali persatuan umat Islam di Indonesia. Sekalipun dua dari empat tokoh pendiri MIAI berasal dari NU, namun mereka hadir atas nama pribadi. Baru dua tahun kemudian, NU tergabung di dalamnya.⁷

Setelah bergabungnya NU ke dalam MIAI (*hailis al-islam A'la Indonesia*) menandai mulai manifestasi orientasi

Hal ini menyebutkan bahwa kemunculan tokoh-tokoh Muslim merupakan satu dari tiga fenomena yang menjadi awal perkembangan NU sejak Muktamar IX (1934). Dua fenomena lainnya adalah pemisahan sidang Syuriyah dan Tarjidiyah dalam Muktamar itu, setelah sebelumnya sidang-sidang selain dicampur oleh Syuriyah serta dibentuknya tata cara sidang. Lihat Anam, *Ibid.*, h. 89-91.

⁷MII didirikan oleh K.H. Wahab Hasbulleh (NU), K.H. H. Dahlan (NU, bedekan dengan K.H. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dan telah meninggal pada tahun 1923), K.H. Nas Nasir (Muhammadiyah), dan W. Wondoamiseno (SI). Pada awalnya organisasi-organisasi yang menjadi anggota Federasi MII adalah SI, al-Islam (Solo), Persyarikatan Umat (Malang), Muhammadiyah, Hidayat al-Islamiyah (Banyuwangi), al-Khairiyah (Surabaya), dan al-Irsyad (Surabaya). Tentang pembentukan MII, lihat Noer, op. cit., h. 260-267.

politik organisasi ini. Di dalam MIAI, NU bersama GAPI (Gabungan Politik Indonesia) turut aktif menyuarakan tuntutan Indonesia berparlemen.⁸

Pola interaksi yang dialami dalam MIAI membawa pengaruh besar terhadap NU. Muktamar NU XV (1940) di Surabaya menjadi ajang penegasan tuntutan yang dilontarkan MIAI, termasuk tuntutan Indonesia berserikat. Hal-hal lain yang dituntut oleh NU antara lain adalah dilakukannya perbaikan-perbaikan seperti diberikannya pertolongan terhadap jamaah haji Indonesia yang terperangkap di Makkah akibat perang Belanda-Jerman, mencabut *Guru Ordonantie* (1825) yang dianggap merugikan umat Islam, termasuk hal yang menyangkut siapa yang menjadi kepala negara di Indonesia merdeka nanti. Dalam sebuah rapat tertutup yang dihadiri oleh sebelas orang tokoh NU, dihasilkan keputusan dua orang calon presiden: Soekarno dan Mohammad Hatta, dengan sepuluh suara untuk Soekarno dan satu suara untuk Hatta.⁹ Tak satupun tuntutan yang diajukan itu terpenuhi.

Ketika pendudukan Jepang dua tahun kemudian membuat persoalan-persoalan itu tidak relevan lagi. Regim kolonial baru ini segera tampak jauh lebih represif

B. H. BENTON AND J. R. BROWN

$$\text{Pois}(\text{exp}(1)) \sim \text{Gaussian}(\mu = 1, \sigma^2 = 1) \approx \text{Uniform}(0, 2)$$

dari pada regim sebelumnya: semua organisasi politik dibekukan, dan setiap kegiatan politik dilarang sama sekali. Umat Islam yang semula menaruh harapan pada "saudara tua" yang membebaskan dari kekuasaan "kafir" Belanda segera menemukan kekecewaan yang dalam. Lebih lagi karena ternyata bagi Jepang, sebagaimana Belanda, terpisahnya Islam dari politik adalah salah satu bagian dari rencana umum, dan kerena itu mereka tetap mengawasi secara ketat organisasi-organisasi Islam terutama terhadap pendidikan Islam. Langkah pertama adalah mendirikan Kantor Urusan Agama (*Shumūbu*) yang dipimpin oleh kolonel Horrie, dengan tindakan pertama menempatkan semua rumah ibadah Islam di bawah pengawasan tentara Dai Nippon.¹⁰ Tindakan selanjutnya adalah mengusayakan terbentuknya sebuah organisasi federasi Islam yang antara lain ditujukan untuk mencegatkan MIAI yang terkesan anti kolonial. Maka dibentuklah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tahun 1943, dimana NU, sebagaimana dalam MIAI, tersubordinasi di dalamnya.¹² Pada masa ini NU sebenarnya memperoleh beberapa konsesi. Seperti yang tampak dalam pengangkatan Rais Akbar NU,

¹⁰Genteng untuk Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang, libat Harry J Benda, Bulan Sabit dan Matahari terbit, silih baleesa Daniel Dekhidae (Jakarta: Pustaka Jawa, 1980) h. 172.

$$\lambda \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\} \cup \{2n+1, 2n+2, \dots, 3n-1\}$$

hadistas Sveikh R.H. Hasyim Asy'ari, sebagai Keraia Shumubu (menyalurkan Husein Diajadiningrat yang menggantikan Horrie) serta sebagai ketua umum pengurus Masvumi yang pertama, sehingga NU dimungkinkan untuk memegang peran yang cukup berarti. Keuntungan ini--kalau boleh disebut demikian--dimungkinkan setidaknya oleh dua hal. Pertama, sikap NU kepada Jepang cenderung lunak. Sikap lunak NU kepada Jepang tentu saja sepijang tidak melemahkan sendi-sendi soliditas Islam. Terhadap perintah untuk melakukan *Seikerei* (ritual penghormatan kepada Tenno Heika dengan cara mirip *ruku'* ke arah matahari terbit) misalnya, NU menentang keras, antara lain dari KH Hasyim Asy'ari sendiri serta memunculkan perberontakan di Singapura. 13

Kedua, berkaitan dengan politik Jepang untuk menggalang semua kekuatan anti-Belanda ke pihaknya, sehingga mereka perlu memperlakukan dengan baik, serta memenuhi keinginan secara baik pola terhadap umat Islam khususnya yang berbasis pedesaan.¹⁴ NU mau tak mau adalah kunci ini. Serta manfaat lain yang bisa diperoleh NU dengan siasat sikao lunaknya kepada Jepang adalah berupa

Ketua Perkumpulan Sitemoul NU dan Pancasila
Jl. Kartini Pustaka Samar-Harapan, 1989 (n), no. 82.

$$\int_{\Omega} \phi^2 \nabla \phi \cdot \nabla D(x) \phi \, dx = \int_{\Omega} \phi^2 D(x) \phi \, dx - \int_{\Omega} \phi^2 \nabla \cdot D(x) \phi \, dx.$$

pelatihan ketrampilan miliser bagi para santri dan kiai di pesantren, yang kemudian melahirkan milisi-milisi revolusioner *Hizbullah* dan *Sabilliah*.¹⁵ Kalangan NU pada umumnya memandang bahwa saham mereka dalam perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan disumbangkan melalui kedua milisi itu. Sementara dipanggung perjuangan politik, peran NU tersalur melalui Masyumi, yang dibentuk beberapa bulan setelah proklamasi. Partai Masyumi terbentuk sebagai buah dari keputusan Muktamar Islam Indonesia di Yogyakarta (7-8 Nopember 1945), yang juga memutuskan bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai politik bagi umat Islam di Indonesia.¹⁶ NU, bersama Muhammadiyah, Persirakatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam, adalah organisasi-organisasi pertama yang memasuki Masyumi.¹⁷ Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam tidak dapat bertahan lama, bahkan sejak awal pun sebenarnya tidak utuh. Perti misalnya, di bulan yang sama terbentuknya Masyumi, di Bukittinggi Perti menyatakan diri sebagai partai politik Islam. Dan dua tahun kemudia,

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \tilde{f}(t) + \tilde{g}(t) \right|^2 dt = \left\| \tilde{f} \right\|_2^2 + \left\| \tilde{g} \right\|_2^2 - 2 \operatorname{Re} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(t) \tilde{g}(t)^* dt.$$

10 Delleri : Partai Islam di Pentas Nasional (Jakarta: PI Pustaka Utama Graffiti, 1981) h. 37.

¹⁷ Nasyuni memperintai dua macam kerugian perorangan dan organisasi. Dualisme ini didasarkan pada pertimbangan untuk memberhentikan sengaja disarinkan agar Nasyuni dapat dilihat sebagai wakil umat Islam tiba-tiba ada yang merasa tidak terwakili. Lihat *ibid.*, n. 48.

karena adanya peluang untuk duduk dalam kabinet Amir Syarifuddin, sementara Masyumi menolak peluang, PSII memutuskan keluar dari Masyumi dan tampil sebagai partai politik sendiri.¹⁸ Dengan alasan tersendiri NU pun keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri.

C. NU Sebagai Partai Politik

Struktur pimpinan pusat Masyumi terdiri dari Pimpinan Partai (yang melaksanakan tugas eksekutif sehari-hari) dan Maielis Svuro (semacam dewan pertimbangan dan pemberi atwa Pimpinan Partai dalam garis besar tindakan partai). Secara tradisional posisi penting dalam Maielis svuro ditegaskan oleh tokoh ulama NU. Sementara pimpinan partai, yang sangat dominan, diisi oleh kalangan pembaharu yang biasanya para intelektual. Sehensnya struktur lkepemimpinan semacam ini lebih banyak menimbulkan persoalan dari pada menguntungkan, meningkat kesan yang timbul adalah adanya kompartimentalisasi antar unsur dalam partai federasi ini. Terlebih lagi tidak pernah begitu jelas perincian tugas antara kedua struktur pimpinan itu. Seasana hubungan antara keduanya sangat kondusif bagi munculnya konflik, dimana akhirnya Maielis Svuro terus menerus

The author's biography

digiring ke arah peran yang semakin tidak berarti.¹⁹ menjadi "dewan pensasehat" yang seringkali tidak begitu diindahkan. Disinilah bersumber kekecewaan NU terhadap Masyumi.²⁰ Sumber lain adalah berkaitan dengan jabatan Menteri Agama dalam kabinet Wilopo. Dalam kiai NU, kursi Menteri Agama adalah bagian mereka. Sebab di samping sudah devikian adanya sejak awal kemerdekaan, NU menilai dirinya sebagai cermin dari mayoritas umat Islam Indonesia dilihat dari segi "ilmu, akaidah, dan amaliyahnya". Namun karena pertimbangan-pertimbangan lain, Masyumi mengajukan nama Fakih Usman (Muhammadiyah) kepada formatur kabinet untuk jabatan tersebut. Pada 15 April 1952, hanya sepoluh hari setelah pencalonan itu disetujui oleh formatur kabinet, NU memutuskan keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai Farpol.

Sebab-sebab itulah umumnya dilihat sebagai faktor pendorong kelahiran NU dari Masvumi. Perubahan NU menjadi oarpol membawa umat Islam Indonesia ke dalam dikotomi kepemimpinan politik. Kepemimpinan politik kaum modernis di Masvumi, dan kepemimpinan politik kyai (ulama) tradisional di NU. Lebih jauh lagi, hal itu juga membawa

Perubahan struktur organisasi Nasvomi dari periode ke periode secara mendalam berakar matematika cerita Nasjelis Swar di dalamnya. Lihat *ibid.*, h. 67-71.

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, No. 1, January 2005
DOI 10.1215/03616878-30-1 © 2005 by The University of Chicago

perubahan dalam perimbangan kekuatan politik Indonesia saat itu. Hasil-hasil Pemilu 1955 menggambarkan dengan jelas tentang perimbangan kekuatan baru. Di sini, NU dengan perolehan suara sebesar 6.955.141 (18,4 % dari keseluruhan suara masuk) dan 45 kursi di parlemen, menempatkan diri pada posisi ketiga setelah PNI dan Nasvomi, dan setingkat di atas PKI.²¹ Mengingat NU sebagai partai yang relatif baru, sehingga persiapan untuk menghadapi pemilu boleh dikacaukan kurang jika dibandingkan dengan partai-partai lain, maka perolehan suara NU yang menempatkan pada posisi ketiga di atas sungguh di luar dugaan. Seperti terlihat di dalam Tabel 1, di bawah ini, NU menempati urutan ketiga atau masuk ke dalam empat besar.

Tabel 1. Hasil Pemila 1955

Nama partai	Jumlah Suara yang diperoleh	Persen-	Jumlah Kursi di Parlemen	
			tase	
PNI	8.434.653	22,3	57	
Masvomi	7.903.886	20,8	57	
NU	6.955.141	18,4	45	
PKI	6.176.914	16,4	39	
Lain-lain	8.314.705	22,0	59	

² Muzammil Sya'ani, Muslim-Government Relation in The Indonesian New Order: Making Sense of the Nahdlatul Ulama's Withdrawal from Practical Politics, dalam Islam and Development: A Political-Religious Response, (Jakarta: Penerbit-Nichtreal, 1997) h. 206.

Politik, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984) sebagai misal Marijan, *op.cit.*, h. 74

Kalau sebelumnya, di parlemen, NU hanya menempati urutan ke sepuluh (8 kursi), setelah Pemilu 1955 beralih ke urutan ketiga (45 kursi). Dengan begitu, posisinya tidak begitu jauh berbeda dengan posisi Masvumi. Pada pemilu 1955 ini Masvumi memang memperoleh kenaikan kursi, tetapi tidak begitu besar, dari 44 kursi menjadi 57 kursi. Yang cukup mendekutkan adalah perolehan suara yang dimiliki PSI dan Partai-partai lainnya yang beraliran sosialis, mengalami penurunan. Di parlemen, kursi yang dimiliki turun dari 6 % menjadi 2 %. PSI, misalnya, turun dari 14 kursi menjadi 5 kursi, atau Murba dari 4 kursi menjadi 2 kursi.

yang cukup menarik, sebagian besar massa pendukung partai berada di Jawa, seiring dengan banyaknya penduduk yang memang berada di Jawa. PRI memperoleh suara 72,9 % di Jawa, NU memperoleh suara 64,7 %, dan PKI sebanyak 88,8 %. Dari empat besar partai ini hanya Masvumi yang paling sedikit memperoleh dukungan di Jawa, 51,6 %. Namun, perolehan suara Masvumi lebih merata di berbagai daerah (kantong-kantong Islam di luar Jawa).²²

Mengomentari perolehan suara NU yang dipandang

Journal of the American Statistical Association

spektakuler ini, oleh para penagamat menilai senada bahwa faktor utama penentu reputasi NU ini adalah peranan kyai dan pesantren yang menjadi basis massanya.²³

Yang pasti prestasi spektakuler itu telah membuat posisi NU kian menaati. Setidaknya tercermin dari perolehan kursi NU dalam kabinet koalisi yang terbentuk tidak sama keudian.²⁴ Jika dalam kabinet sebelumnya NU hanya memperoleh dua jabatan menteri, maka dalam kabinet baru itu NU memperoleh empat jabatan: Menteri Dalam Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Sosial, dan Menteri Agama disamping jabatan Wakil Perdana Menteri II yang diperoleh oleh Idham Chalid. Kabinet koalisi PNI-Nasvumi-NU itu, sebagaimana kabinet-kabinet lain dalam periode *interregnum* Demokrasi liberal ini, tidaklah berumur panjang. Kurang dari setahun sejak memulai masa kerjanya, kabinet itu jatuh dan digantikan oleh Kabinet Karva yang diimpiin Juanda, sebelum akhirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa sistem politik Indonesia ke dalam era Demokrasi Terpimpin. Setelah jatuhnya kabinet koalisi

2. Prof. Dr. Sari Brulissen, M.I. Traktat, Metamorfosis Kuasa, Perkalian Naskah Baru, (Yogyakarta: UGM, 1994) hlm. 62-63.

Politikus tidak ada partai yang memberikan suara mayoritas dalam pemilu 1955. Sebaliknya kabinet yang berjalan pun kemudian adalah hasil koalisi antara PNI-Pasundan dan NU. Dukungan sebenarnya menginginkan PKI untuk ikut dalam pemerintahan koalisi itu. Iepi NU dan Nasrullah mengakui peran sendiri terhadap

itu, peran partai politik merosot sama sekali.

Dalam Demokrasi Terpimpin, panggung politik Indonesia praktis dikuasai oleh kekuatan tiga aktor politik: Sukarno, PKI dan Angkatan Darat, dengan menyisakan sedikit porsi peran yang tidak berarti untuk partai-partai politik yang ada. Beberapa partai bahkan tidak memiliki cukup daya *survival* berhadapan dengan upaya penyederhanaan kepartaian yang dilakukan oleh Sukarno. Sehingga hanya tersisa sepuluh partai. Masyumi termasuk yang disingkirkan, terutama karena keterlibatan tokoh-tokohnya dalam pemberontakan PRRI. NU lebih mampu bertahan karena sikap akomodatif antara NU dan Sukarno dipertautkan oleh subkultur paternalis, yang walaupun berangkat dari dua budaya (Sukarno, dari budaya Jawa:NU dari budaya pesantren), namun memiliki ciri-ciri yang sama makna kemungkinan defensiasi sosial NU tentang Demokrasi adalah basis kultur pesantren tersebut. Sedangkan defensiasi sosial demokrasi dari tokoh-tokoh Masyumi, kemungkinan berangkat dari literatur dan pemahaman kental yang kontekstual dengan masyarakat Barat yang liberal. Namun, kedekatan NU terhadap Sukarno karena sikap akomodatifnya dipandang oleh Syafii Ma'arif sebagai strategi dasarnya adalah bagaimana menyenangkan Sukarno dan menjaga agar ia bersedia melindungi

kepentingan mereka 25

Bubarnya Masyumi lalu menjadikan NU sebagai partai Islam terbentuk di Indonesia. Namun NU tetap tidak mampu menyamai kebesaran Masyumi, terutama sekali ketika NU sendiri masih berada di dalamnya. Agaknya hal itu disebabkan karena tampilnya NU sebagai partai Islam terbesar semata-mata karena massanya yang kalang Islam tradisional secara kebetulan merupakan mayoritas umat Islam di Indonesia.

Sementara, proses Demokrasi Terpimpin berakhir bersamaan dengan merebak suatu "prahara politik" di hari pertama bulan Oktober 1965. Peristiwa percobaan ini duduk oleh apa yang menamakan dirinya G-30-S yang melibatkan banyak kalangan, termasuk unsur-unsur dari dua aktor dalam segitiga kekuasaan Demokrasi Terpimpin, PKI dan Angkatan Darat, segera memunculkan epilog panjang: meluasnya perasaan anti-PKI di kalangan masyarakat; runtuhnya pola hubungan segitiga Sukarno-PKI-Angkatan Darat yang menaikkan militer sebagai dominator kekuasaan; krisis ekonomi dan inflasi yang farah; di samping krisis politik yang nyaris membawa negara ke jurang *chaos*. Dan pada ketika itu juga, NU melajui Subchan ZE melakukan

²⁵Syafii Ma'arif, Islam dan Rasalah Kemerdekaan (Jakarta: LPSES, 1983) p. 184.

penggalan kekuatan anti komunis dar terbentuklah KAP-Gestapo, sebuah kekuatan aksi penggayaangan G-30-S yang kemudian "menuntut dilarangnya PKI,... dibersihakannya kabinet, parlemen, MPRS, dan semua lembaga negara dari komunis dan simpatisan mereka".²⁶ NU dengan Pemuda Ansoranya telah memotori aksi anti-PKI di kalangan sipil segera setelah G-30-S, dan NU pula yang kemudian banyak terlibat dalam pembantaian yang dilakukan dengan sepengatahan--kalau bukan digerakkan Angkatan Darat. Bahkan di Jawa Timur, Ansor bergerak spontan mendahului tentara. Antara 250.000 hingga 500.000 orang terbunuh dalam penumpasa PKI secara fisik, yang segera disusul dengan pembubaran PKI secara formal, sehari setelah ditandatanganinya SP ii Maret 1966.²⁷ SP ini sekaligus menandai lahirnya sebuah tatanan politik baru yang membawa komitmen untuk melaksanakan Pancasila dan UUD

26 Mengenai pembantaian orang-orang komunis beberapa bulan setelah pemberontakan G-30-S, lihat Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, alih bahasa Th. Sumartana (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1986), h.162-174. Sikap keras NU terhadap PKI bukan hanya karena motivasi politik, tetapi yang paling dominan adalah motivasi agama. Anam op.cit., h. 244.

27 *Tib. 103*

1945 secara murni dan konskuen serta mengoreksi semua kesalahan Orde Lama.

Meski secara *de facto* Supersemar adalah penyerahan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto, namun ia tidak mau bersikap radikal dalam melepaskan Sukarno dari kekuasaannya karena dukungan terhadap Sukarno masih besar. Sementara pada sisi lain ia masih ragu akan popularitas dan dukungan rakyat kepadanya. Ia kemudian mengambil cara inkremental untuk secara bertahap mengurangi kekuasaan Sukarno dan akhirnya melepasikan sama sekali. Suharto juga tidak mau bertindak gegabah dengan memborong semua porsi kekuasaan dan mampaginya habis untuk perwira-perwira Angkatan Darat.²⁸

Hengacu pada Mohtar Mas'eed, Orde Baru merupakan kebangkitan koalisi besar, dengan anggota inti Angkatan

28 Upaya itu dilakukan baik secara "konstitusional" dengan menekan MPRS agar mengesahkan ketetapan-ketetapan yang diusulkan oleh Angkatan Darat (terutama tentang pengukuhan Supersemar sebagai TAP MPRS dan penuntutan tanggung jawa terhadap Sukarno yang akhirnya bermuara pada upaya intensif untuk menyudutkannya), maupun dengan jalan memperkuat tempat berpijaknya sendiri dengan cara memperkuat tempat berpijaknya sendiri dengan cara memproras perwira-perwira pendukung Sukarno dari posisi penting Angkatan Darat yang dilakukan bersamaan dengan upaya serupa terhadap ketiga angkatan lainnya, bahkan juga lembaga-lembaga tinggi negara. Lihat Crouch, op.cit., h. 220-227.

Darat, intelektual sipil anti komunis dan para pengusaha.²⁹ Aliansi ini segera memusatkan perhatian untuk membenahi semasa warisan krisis dari regim Orde Lama dengan melakukan "stabilisasi dan pembangunan ekonomi yang berorientasi ke luar".³⁰ Upaya ini berdampak panjang dan rumit bagi partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia. Semula NU agak ragu untuk memberikan dukungan terhadap Suharto. Namun ketika semakin jelas bahwa ia cukup memiliki pijakan legitimasi yang kuat untuk berkuasa,

Tuntutan yang segera muncul begitu Orde Baru mulai melangkah adalah diselenggarakannya pemilihan umum. Baik Sukarno maupun partai-partai politik sangat berkepentingan dengan diadakannya periu dalam tujuan masing-masing. Namun AD tentu tidak mau mengambil resiko. Mengadakan Pemilu--yang akan menggambarkan arah dukungan rakyat, sementara AD tidak dapat menjamin popularitasnya dikalangan rakyat--sebagai tindakan bunuh diri. Karena itu pemerintah berusaha memperlambat tempo pemilu dengan jalan mengulur-ngulur proses disahkannya UU tentang Pemilu. Langkah pertama diambil melalui Seminar AD 1956

²⁹ Mohtar Nas'eed, *Economis dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989) h. 53-58.

³⁰Ibid., h. 56-60.

mengusulkan rancangan UU tentang Pemilu yang banyak mengundang kritik dari wakil-wakil rakyat di DPR-GR, dan karenanya tidak dapat disetujui dalam waktu singkat. Sementara itu, ditandatanganinya Paket 27 Juli 1967 di mana partai-partai dan pemerintah, saling memberi komensi menyebabkan UU pemilu perlu di susun ulang. Akibatnya pemilu yang di sepakati akan dilaksanakan pada 5 Juli 1968 secara teknis menjadi tidak mungkin terlaksana. Ketika pada Maret 1968 MPRS bersidang dan mengangkat Suharto sebagai Presiden pemih, pemerintah sekali lagi mengusulkan penundaan pemilu selama lima tahun. Namun-partai-partai politik berhasil mendesakkan kompromi yang mengharuskan pemerintah melaksanakan pemilu pada 15 Juli 1971.

Pada rentang waktu penundaan pelaksanaan pemilu, pemerintah berupaya melemahkan partai-partai politik. Dalam masa ini tercatat berdirinya sebuah partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada 20 Januari 1968. Partai ini sebenarnya lahir prematur dari kandungan keinginan untuk menghidupkan kembali Masyumi. Pemerintah secara tegas menolak keinginan tokoh-tokoh Masyumi untuk merehabilitasi partainya, sambil mengingatkan

³⁴Libat antara lain Erbach, op.cit., h. 278-285.

keterlibatan mereka dalam pemberontakan PRRI,³² walaupun pemerintah juga menyatakan "tidak berkeberatan terhadap pembentukan partai yang basis massa Masyumi".³³

Sementara itu AD terus mengembangkan Golakar, yang didirikan pada 20 Oktober 1954 dengan nama Sekber Golkar, menjadi partner sekaligus lengan politiknya. Golkar yang tidak memiliki akar kuat ke bawah, segera menggunakan apa yang kemudian disebut sebagai "taktik bulldozer" untuk mengalihkan suara partai-partai lain terhadapnya. Menghadapi PNI, Golakar diuncungkan oleh Permendagri nomor 12 tahun 1969 yang mengharuskan pegawai Depdagri, sumber dukungan terbesar PNI, bergabung dengan Kokarmendagri. Demikian pula PP No. 6 tahun 1970 yang mewajibkan pegawai negeri hanya memiliki loyalitas tunggal. Sedangkan menghadapi partai-partai Islam dipilih cara untuk mengambil hati para ulama, antara lain dengan menghidupkan kembali GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam). Sasaran lain yang diraup Golkar adalah

32 Penolakan pemerintah terhadap rehabilitasi Masyumi tampaknya didasari oleh keengganannya untuk elihat munculnya sebuah kekuatan politik Islam yang besar sebagai mana Masyumi dahulu. Alasan Suharto tentang keterlibatan sejumlah tokoh Masyumi dalam pemberontakan PRRI terasa hipokrit ketika ia kemudia ternyata menyertakan Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom tokoh PSI yang juga terlibat PRRI, dalam kabinetnya.

³³Crouch, *op.cit.*, n. 292.

ex-anggota PKI dan ormas-ormasnya. Tidak heran jika Pemilu--yang akhirnya terselenggara pada 3 Juli 1971, ditandai lahirnya sebuah kekuatan politik dominan yang baru dengan keberhasilan Golkar memperoleh 62,6 % suara dalam pemilu. Parpol-parpol lain pada umumnya berantakan menghadapi taktik Golkar dalam Pemilu 1971. Hanya NU yang

mampu bertahan dengan perolehan 18,7 % suara telah memperbaiki penampilannya dalam Pemilu 1955.³⁴

Al-hasil, strategi monoloyalitas yang dilontarkan Mendagri jelas tidak berarti banyak berhadapan iengsi. NU yang dipimpin oleh para kiai yang tidak terikat pada gaji pemerintah. Demikian juga kebijaksanaan *floating mass* yang memotong akar partai di pedesaan sebagai konsekuensi dari pembatasan di dalam hirarki struktur partai yang diharuskan, tidak menjadi persoalan bagi NU, karena kiai masih menjadi panutan massa Islam pedesaan yang paternalistik. Dengan bertumpu pada dikungan kiai, NU berhasil meyakinkan para pemilih Islam di desa-desa, khususnya di daerah seperti Jawa Timur, bahwa pemilu adalah batu ujia bagi iman mereka.

³⁴ Untuk basil-basil Pemilu 1971, lihat antara lain M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), h. 179.

D. NU dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Ketika stabilitas politik diterima sebagai prasyarat pembangunan ekonomi, maka regim Orde Baru sangat intens menciptakan semua prakondisi yang diperlukan untuk pemantapan stabilitas itu, serta mengeliminasi, setidaknya meminimalkan semua kemungkinan ke arah sebaliknya. Salah satu bentuk upaya ini adalah tindakan restrukturisasi partai politik--klat manajemen konflik yang sebenarnya diwarisi dari regim sebelumnya dengan berbeda pola pelaksanaannya. Proses ke arah penyederhanaan partai pada dasarnya sudah dimulai sejak awal 1970, sebelum pemilu pertama dilaksanakan.

Pada Februari 1970, di depan para pimpinan ke-9 parpol dan Golkar Presiden Suharto menyampaikan saran tentang pengelompokan partai-partai. Tujuannya adalah untuk mempermudah kampanye pemilu, dan selanjutnya mempermudah sistem administrasi seperti penyusunan fraksi di DPR kelak, bukan untuk melenyapkan partai-partai itu sendiri.³⁵ Setelah melalui tahap dialog antara pemerintah dan partai-partai, seruan Suharto itu memperoleh tanggapan positif. Maka pada bulan berikutnya terbentuklah pengelomokan dimaksud, PNI, IPKI, Murba,

³⁵Fathoni dan Zen, op.cit., n. 97.

Parkindo dan Partai Katolik bergabung dengan kelompok Nasionalis. Sedang NU, Parmusi, PSII dan Perti membentuk kelompok spiritual. Kelompok pertama disebut *Kelompok Demokrasi Pembangunan*, dan yang kedua disebut *Kelompok Persatuan Pembangunan*.³⁶

Ketika semakin pasti bahwa fusi partai tidak mungkin ditolak, maka pada 5 Januari 1973 keempat partai Islam itu berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, ditandai penandatanganan sebuah deklarasi di Jakarta.³⁷ Struktur kepemimpinan PPP diusahakan agar dapat menampung semua partai pendukung secara proporsional, agaknya dengan mempertimbangkan perimbangan kekuatan dalam Pemilu 1971. Itulah sebabnya, dominasi NU dalam partai ini terasa diborongnya posisi penting dalam kepungurusan pusat PPP oleh NU.³⁸

³⁶ Bambang Purwoko, *Pembangunan partai Persatuan Pembangunan (1973-1986)* (Skripsi FIPOL-UGM, 1988) dalam sebagaimana dikutip oleh A. Saifur Karim, *Heterosis NU dan Politik Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 1994) h. 67-68.

³⁷ Deklarasi ini ditandatangani oleh KH Idham Chalid (NU), HMS Mintarega (MI), H Anwar Tjokroaminoto (SI), H Rusli Halil (Perti) dan KH Masykur (NU). Isi deklarasi ini bisa dilihat antara lain Syamsudin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru* (Jakarta: PT Grasindo, 1971) h. 158.

³⁸Jabatan-jabatan penting yang dipegang INU adalah Presiden Partai, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat, Sekjen, Ketua Umum Majelis Pertimbangan Partai, dan Rais Am Majelis Syuro. lihat Haris, ibid., h. 162.

Kekompakkan elit PPP tidak bertahan lama. Disamping adanya perbedaan pendapat dalam melakukan pembahasan Rantap MPR tentang P-4 sebagai tap MPR dan aliran kepercayaan ke dalam GBHN. Secara esensial semua unsur PPP menolak dimasukkannya P-4 sebagai tap MPR dan alirak kepercayaan dalam GBHN, namun perbeda itu muncul melalui strategi dan taktik yang dipakai. Ketika MPR sulit menemukan kata sepakat dalam pembahasan tersebut, maka dipilih cara voting. Di sini perbedaan muncul. Unsur MI menginginkan PPP ikut dalam voting sekalipun mungkin kalah, sementara SI mengusulkan agar abstain saja, sedangkan NU bersi keras menolak voting dan memilih walk out dari ruang sidang.³⁹

Retaknya kekompakan ini barangkali sebenarnya tidak terlalu berdampak buruk bagi partai. Hanya saja pada waktu yang nyaris bersamaan mulai muncul bibit kekecewaan NU terhadap PPP, yang sebagaimana terhadap Masyumi dulu, berkisar dalam masalah distribusi kekuasaan. Puncaknya, menjelang persidangan DPR 1980/1981 terjadi perebutan kursi ketua komisi-komisi yang telah menjadi jatah FPP di DPR antara NU dan MI. Awalnya adalah ketika FPP memperoleh jatah 13 kursi untuk komisi DPR. Jatah kursi

39 Harijan, opacities, n. 112.

DPR antara NU dan MI. Awalnya adalah ketika PPP memperoleh jatah 13 kursi untuk komisi DPR. Jatah kursi ini lalu dibagi dengan rasio NU:MI:SI:Perti= 7:4:1:1. Dan sesuai dengan kesepakatan fraksi-fraksi di DPR, PPP mendapat jatah untuk mengejutai Komisi-komisi I, VII, dan VIII. Semula, Komisi I diketuai oleh Amin Iskandar (NU), Komisi VII oleh Rahmat Mulyojomiseno (NU), dan Komisi VIII oleh Ismail Hasan Metareum (MI). Lalu, di tahun 1978 NU sepakat meminjamkan kursi Ketua Komisi VII kepada MI, dengan catatan harus dikembalikan setahun kemudian. Pada tahun berikutnya, MI ternyata menolak permintaan NU untuk mengembalikan pinjamannya itu, bahkan MI meminta perpanjangan selama satu tahun lagi. NU setuju. Namun di tahun 1980 MI ternyata bersikeras mempertahankan kursi Ketua Komisi itu. ketika NU terus menuntutnya, disadakanlah voting. Tapi di sini NU kalah, karena MI didukung oleh FKF dan FABRI. Perebutan jabatan bahkan lalu merambat pada kursi Ketua Komisi lainnya. Lagi-lagi NU kalah, sehingga rasio jatah kursi Komisi milik PPP antara NU dan MI menjadi 5:6.³⁹

Berangkat dari "lagu" lama perebutan kekuasaan antara kalangan modernis dan Islam tradisional—merambat

³⁹Ibid., n. 67-69; Marijan, op.cit., n. 115.

pada keluarnya NU dalam tubuh Paratai Persatuan Pembangunan. Di sini NU merasa yakin--dan penulis yakin saat mencapai klimaks bagi NU untuk meninggalkan persoalan-persoalan politis.

E. Munculnya Gagasan Khittah 1926

Bahwa keterlibatan yang berlebihan dalam dunia politik akan membawa efek terlalu menonjolnya kepentingan pribadi elit NU dibandingkan kepentingan jamaah, dan bahwa itu juga menyebabkan NU setahap demi setahap mulai kehilangan bidang-bidang kegiatan lainnya: dakwah, pendidikan, sosial dan budaya, sudah sejak lama muncul dalam benak kesadaran NU. Keinginan untuk mengoreksi keadaan ini sudah sejak terlontarkan, dan, karena itu, pemikiran untuk kembali ke khittah 1926 bukanlah sesuatu yang baru. Pertama kali itu terlontar pada Muktamar ke-22 di Jakarta, Desember 1959. Seorang juru bicara dari Pengurus Cabang Mojokerto, KH Achyat Chalimi, menilai bahwa, Peranan politik oleh Partai NU telah hilang dan peranan di pegang oleh perseorangan, hingga partai sebagai alat sudah hilang. Oleh karena itu, diusulkan agar NU kembali pada tahun 1926.⁴⁰ Hanya satu Pengurus

Varijans, opvattingen, hz. 152.

Cabang yang mendukung gagasan ini, selebihnya, pemikiran tersebut memperoleh tanggapan yang menentangnya. Dan gemanya pun berhenti di sini.

Lalu, pemikiran serupa kembali digelindingkan tahun 1971 dalam Muktamar ke-25 di Surabaya. Kali ini gagasan datang dari Rais Aam KH Wahab Hasbullah, dan barangkali karena itulah memperoleh sambutan yang lebih baik. Hal itu terlihat dari kenyataan bahwa salah satu persoalan yang cukup serius diperdebatkan adalah kehendak agar NU kembali kepada garis perjuangannya di tahun 1926 ketika pertama kali didirikan: mengurusi persoalan agama, pendidikan, dan sosial-kemasyarakatan saja.⁴¹ Namun begitu, gagasan ini akhirnya kalah oleh arus besar keinginan untuk mempertahankan NU tetap berpolitik praktis. Kandasnya gagasan kembali ke khittah sampai kurun waktu ini, jika diperhatikan, disebabkan setidaknya oleh dua hal. Pertama, gagasan itu semata-mata dilandasi oleh alasan politis (NU akhirnya hanya menjadi alat kepentingan politik pribadi para elitnya), dan karena itu solusi yang ditawarkan pun senada, dan tidak populer: agar NU meninggalkan gelanggang politik sama sekali. Ditengah begitu banyaknya keuntungan yang

41 *Thesis*, n. 133.

diperoleh NU dalam pergulatan politiknya, wajar jika keinginan untuk menanggalkan peran politik lalu hanya dipandang dengan sebelah mata. Terlebih lagi jika diingat bahwa pada saat itu peran kelompok politisi (Idham Chalid cs, yang biasanya dipolarisasikan dengan kelompok ulama) masih dominan dalam tubuh NU. Kedua, secara aktual konsep kembali ke khittah tidak terumuskan secara jelas kecuali dalam pengertian minimal "kembali pada tahun 1826". Dan itu bisa dinilai sebagai langkah mundur serta penihilan terhadap nilai-nilai yang diperoleh NU dalam pengalaman selama ini. Ketidakjelasan itulah, boleh jadi, yang menyebabkan pemikiran itu memperoleh respons yang agak ganjil ketika Muktamar ke-25 antara lain memutuskan:

Mempertimbangkan gagasan tentang sebuah wadah baru yang non-politis yang menampung dan membimbing aspirasi Islam *ahlussunnah wal jamaah* di kalangan umat, yang oleh karena faktor-faktor lainnya harus meninggalkan ikatan-ikatan politiknya dengan partai politik.⁴¹

Perumasan secara lebih jelas tentang konsep kembali ke khittah baru berkembang menjelang Muktamar ke-26 di

41 PEWI, Keputusan Muktamar № ke-25 di Surabaya, seperti dikutip dalam ibid., h. 135.

Semarang, 1979. Landasan pemikiran yang dulunya semata-mata politis kini dilengkapi dengan alasan moral. Merenungi perjalanan politik NU selama ini, seorang ulama berpengaruh dari Jawa Timur, KH Bachrus Ali, menyebutkan bahwa telah terjadi kerusakan bathiniyah yang parah dalam NU, dan para tokohnya dianggap terlalu *hub al-riyاسah* dan *hub al-jaah* (cinta kekuasaan dan cinta keduniawan).⁴²

Ulama Senior NU lain, KH Achmad Siddiq, menilai perlunya segera dirumuskan teks untuk kembali ke "Khittah Nahdliyah", garis-garis besar tingkah laku perjuangan NU. Menurutnya, saat itu telah semakin jauh jarak waktu antara generasi pendiri NU dan generasi penerus, serta makin luasnya medan perjuangan dan bidang garapan NU. Disamping itu, ulama generasi pendiri NU telah semakin berkurang jumlah dan peranannya dalam kepemimpinan NU. Itulah sebabnya NU dikhawatirkan akan kehilangan arah di masa nanti jika prinsip khittah nahdliyah tidak secepatnya disusun rumusannya.⁴³

⁴² Brief Mudatsir, Dari Situbondo menuju NU Barus. Sebuah Catatan Awal, dalam Prisma Nomor ekstra, 1984, h. 133.

⁴³Fathoni dan Zen, op.cit., h. 53.

Namun sementara itu muncul sebuah generasi baru NU dengan spesifikasinya sendiri. Mereka bukan kelompok ulama yang dapat digolongkan dalam kubu Situbondo, dan bukan pula kelompok politisi yang tergolong dalam kubu Cipete. Mereka lebih tampak sebagai intelektual yang tampil dengan gagasan-gagasan "jalan tengah", dan karena netralitas mereka dalam polarisasi ulama-politisi itu, gagasan mereka bisa lebih objektif dan relatif mudah diterima semua kalangan NU.

Dalam dasawarsa 70-an orang-orang ini banyak mengadakan diskusi untuk merumuskan langkah-langkah pembaharuan NU. Mereka turut merasakan keprihatinan akan kemunduran NU selama ini, namun tetap menyadarii bahwa politik merupakan dimensi yang cukup penting dari aktivitas NU secara keseluruhan, mengingat dalam makna kelahiran NU pun terkandung nilai-nilai politis. Namun demikian, hubungan NU dengan politik lebih ditentukan oleh sejauh mana persepsi NU tentang politik itu, sehingga persoalannya adalah tentang kualitas politik. Konteks politik semestinya tidak hanya dilihat secara sempit dalam masalah distribusi kekuasaan di DPR misalnya, namun dilihat sebagai upaya mengangkat kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam makna demikian, keikutsertaan NU sangat penting artinya, dan

orientasi aktivitas NU yang terlalu di dominasi oleh politis praktis bisa dilurushkan dengan tampilnya seorang pemimpin yang mampu menata semua bidang garapan NU secara proporsional.

Melalui segala pergulatan pemikiran ini kelompok intelektual generasi baru NU memerlukan perubahan dalam garis-garis perjuangannya, dengan tetap berpegang pada semangat dan ide dasar perjuangan 1926.. Karena itu sekalipun mereka mengajukan gagasan kembali ke khittah 1926 beberapa senior mereka, namun kali ini gagasan tertsebut telah ditcpang oleh fondasi dan rancang bangun yang lebih kokoh. Dan ini secara bertahap dibuktikan dengan tindakan nyata. Sekitar tahun 1974, kalangan ini--Abdurrahman Wahid, Fahmi Saifuddin, Said Budairy, Rozy Munir, Abdullah Syarwani, Siamet Effendi Yusuf, untuk menyebut beberapa nama--mulai melakukan perubahan dalam tubuh NU. Sampai pada tahun 1976 mereka berusaha melakukan pemerataan ide-ide pembaruan di kalangan pengurus, ulama, dan tokoh-tokoh muda lainnya, sehingga pada tahun 1979 ide-ide itu mulai diterapkan melalui lembaga-lembaga otonom NU.⁴⁴

⁴⁴ Brief Mudatsir, loc. cit., n. 157.

Secara singkat, ketika kelompok ini menyuarakan osalan untuk kembali ke khittah 1926 di Muktamar Semarang, sambutan yang diperoleh tampak menggembirakan. Namun, betapa pun, gagasan kembali ke khittah tetap berada dalam pro-kontra. Orang-orang seperti Idham Chalid dan kelompoknya masih tetap mmenghendaki politik praktis. Sementara, kalangan non-politis (ulama dan generasi pembaharu NU) mendukung gagasan kembali ke khittah itu.

